**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kota Langsa TA 2014**

**Banda Aceh, Sabtu ( 18 April 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kedua di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Langsa dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kota Langsa untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Saldo Piutang PBB P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat Belum di Validasi;
3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Langsa Belum Memadai;
4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 Belum Memadai;
5. Mekanisme Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Program Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014 Belum Memadai;
6. Pemerintah Kota Langsa Belum Sepenuhnya Menyiapkan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada PT Pelabuhan Kota Langsa Sebesar Rp 500.000.000,00 Belum Didukung dengan Akta Pendirian Perusahaan;
9. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kota Langsa Sebesar Rp 107.391.586,43;
10. Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 91.738.371,00;
11. Status Tanah Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) Di Atas Tanah Pemerintah Kota Langsa Belum Ditetapkan;
12. Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kota Langsa segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*